Muda Setia

by STIE Widya Wiwaha

Submission date: 02-Jun-2022 01:17PM (UTC+0900)
Submission ID: 1848886131
File name: YAAN_USAHA_MIKRO_DAN_PENGARUHNYA_TERHADAP_KEMANDIRIAN_USAHA.docx (297.63K)
Word count: 7432
Character count: 47302

MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA

(Survey pada Usaha Jajanan di Kota Yogyakarta)

Oleh:
Drs. Mudasetia, M.M.,Ak* dan Evi Rosalina Widyayanti, S.E.,M.M*

ABTRACT

Yogyakarta is a city and the capital of Yogyakarta Special Region in Java, Indonesia. It is renowned as a center of tourism, education and culture. Yogyakarta is one of the foremost cultural centers of Java. This region is located at the foot of the active merapi vulcano. Yogyakarta is often called the main gateway to the Central Java as where it is geographically located. It stretches from Mount Merapi to the Indian Ocean.

This province is one of the most densely populated areas of Indonesia. Yogyakarta is popular tourist destination in indonesia after Bali. These have attracted large number of visitors from across Indonesia and abroad to the city. This status makes Yogyakarta is one of the most heterogeneus cities in Indonesia. In edition, Yogyakarta has attracted large number of people to reside in this city for business. One of these comers is small entrepreneurs with their market munchies enterprise (specially a traditional snack trader). This business is one of famous business in Yogyakarta, we will find rows of pavement vendors selling market munchies. The students and tourists are their main target customers.

Market munchies enterprise is part of small and medium enterprises SMEs as livelihood activities. SMEs has an important role in economic growth of Indonesia. Therefore, it is very important to develop and strengthen the micro enterprise empowerment. Micro enterprise empowerment is one of strategy to reduce the poverty rate in Indonesia. Major challenger in implement this program are that micro entrepreneurs are conventional and have satisfied with their revenue.

It is very important to develop a comprehensive and sustainable micro enterprise empowerment which consist of strengthen the quality of human resources, maximize the government's roles, empower the enterprise capital and strengthen the partnership and autonomous. Micro enterprise autonomy will contribute to the economic and investment climate. This will lead to establish an accountable enterprise both for the micro enterprise and customers which at the end will strengthen the development of the micro enterprise in Yogyakarta.

Keyword: micro entreprise, human resources, government roles, capital, partnership and autonomous.

* Staf pengajar STIE Widya Wiwaha

Penelitian ini dibiayai dengan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2014

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 km^2 yang berarti 1,025% dari luas wilayah propinsi DIY, Dengan Luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa dengan kepadatan rata-rata 13, 177 jiwa/km^2. Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km^2. (Sumber data dari SIAK per tanggal 28 Feb 2013)

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata dipenuhi oleh banyak pendatang dimana kota ini menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah baik Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri maupun daerah lain di Indonesia. Homogenitas masyarakat yang datang ke Yogyakarta dengan berbagai tujuan yang berbeda-beda.Ada yang memiliki tujuan untuk pendidikan, wisata, berdagang mulai dari pedagang kecil hingga besar, investasi dll. Kedatangan mereka ke kota Yogyakarta ada yang sekedar berkunjung namun ada yang menetap hingga akhirnya menjadi penduduk kota Yogyakarta, sehingga mampu menambah kepadatan penduduk kota Yogyakarta. Sebagai tujuan perdagangan kota Yogyakarta sangat menjanjikan keuntungan bagi siapa saja yang berbisnis di kota ini. Tidak terlepas mereka para pelaku usaha mikro yang datang dari berbagai daerah asal. Untuk para pelaku usaha kecil memiliki target market yang cukup besar yaitu kepada mereka para wisatawan dan para pelajar dari tingkat dasar hingga menengah atas bahkan para mahasiswa di Yogyakarta.

Data dari penelitian LIPI memberikan hasil yang sangat mengejutkan ketika ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi se-Jawa. Meski rasanya tidak mungkin, faktanya meski menyandang status Daerah Istimewa angka kemiskinan DIY ternyata tak kalah “istimewa”. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di DIY sebesar 15,03%. Angka tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012. Namun tingkat kemiskinan di DIY tetap menjadi yang terbesar di antara seluruh Provinsi di Jawa. Sebagai gambaran DKI Jakarta yang dikenal memiliki banyak penduduk miskin kota persentase kemiskinannya sebesar 3,72%. Sementara Banten yang dikenal sebagai salah satu provinsi tertinggal memiliki angka kemiskinan 5,89%. DIY pun masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2013

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)			Garis Kemiskinan (Rp/kapita/		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+
Aceh	156,80	698,92	855,71	11,55	20,14	17,72	374 261	337 962	34
Sumatera Utara	689,21	701,59	1 390,80	10,45	10,33	10,39	330 517	292 186	31
Sumatera Barat	124,89	255,74	380,63	6,38	8,30	7,56	360 768	321 252	33
Riau	162,71	359,82	522,53	6,68	9,55	8,42	366 057	339 829	35
Jambi	106,36	175,20	281,57	10,41	7,54	8,42	369 835	280 660	30
Sumatera Selatan	375,96	732,25	1 108,21	13,28	14,50	14,06	328 335	270 166	29
Bengkulu	97,66	222,75	320,41	17,29	17,97	17,75	358 294	313 265	32
Lampung	222,75	911,53	1 134,28	10,89	15,62	14,39	326 468	284 504	29
Bangka Belitung	23,07	47,83	70,90	3,47	6,97	5,25	416 935	436 899	42
Kepulauan Riau	95,34	29,68	125,02	5,79	9,21	6,35	405 578	364 773	39
DKI Jakarta	375,70	-	375,70	3,72	-	3,72	434 322	-	43
Jawa Barat	2 626,16	1 756,49	4 382,65	8,69	11,42	9,61	281 189	268 251	27
Jawa Tengah	1 870,73	2 834,14	4 704,87	12,53	16,05	14,44	268 397	256 368	26
DI Yogyakarta	325,53	209,66	535,18	13,73	17,62	15,03	317 925	275 786	30
Jawa Timur	1 622,03	3 243,79	4 865,82	8,90	16,23	12,73	278 653	269 294	27
Banten	414,46	268,25	682,71	5,27	7,22	5,89	300 109	264 632	28
Bali	105,14	81,38	186,53	4,17	5,00	4,49	298 449	261 613	28
Nusa Tenggara Barat	364,08	438,37	802,45	18,69	16,22	17,25	299 886	263 107	27

Data BPS terbaru pada September 2013 tentang jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia menurut Provinsi. DIY dengan persentase kemiskinan 15,03% menjadi yang tertinggi se-Jawa (www.bps.go.id)

Ada sekitar 535 ribu penduduk miskin di DIY yang sebagian besar di antaranya justru berada di kota yakni 325 ribu sementara 209 ribu adalah penduduk miskin desa. Data ini seakan tegas berbicara di balik megahnya pesona Yogyakarta tersimpan derita penduduknya yang diam-diam sangat mengkhawatirkan, dan kemana penduduk miskin kota ini mencari nafkah? Apa saja profesi yang mereka geluti dalam bertarung melawan kerasnya kehidupan kota (cari internet profesi penduduk miskin kota). Agar usaha mereka dapat menjadi tumpuhan ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan mereka maka usaha mereka perlu diberdayakan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2012), jumlah usaha kecil dan menengah termasuk usaha mikro - selanjutnya baca UKM -- mencapai angka 56,5 juta unit atau 99,99% dari total usaha yang ada dan mampu menyerap lebih dari 107,6 juta tenaga kerja atau 97,2% dari total angkatan kerja yang ada. Disamping itu, UKM juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar 57,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) diluar minyak dan gas. Namun demikian, peranan UKM dalam ekspor masih relatif rendah, yaitu dibawah 20%.

Selanjutnya, kalau data UKM tersebut dipilah lebih rinci lagi, bahwa dari 56,5 juta unit tersebut, 55,8 juta atau 98,79% adalah usaha mikro, 629.418 unit atau 1,11% usaha kecil dan 48.997 unit atau 0,09% usaha menengah. Usaha besar sebanyak 4.968 unit atau 0,01% saja dari total usaha nasional. Bahkan, jika ditinjau dari tingkat pendidikannya, bahwa sebagian terbesar (lebih dari 97%) pengelola usaha mikro dan kecil berpendidikan SLP ke bawah.Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para pengusaha mikro dan kecil sangat rendah sekali.

Karya tulis ini akan mengangkat mengenai bagaimana pelaku usaha mikro dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri, melalui pemberdayaan faktor apa sajakah yang mempengaruhi? Diharapkan Faktor-faktor pengaruh tersebut akan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya kemandirian usaha melalui pemberdayaan. Namun upaya membangun usaha bukan pekerjaan yang mudah. Strategi pemberdayaan yang komprehensif dengan cara menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, pembinaan, pengembangan, pembiayaan dan penjaminan perlu dilakukan secara simultan dalam upaya memperkuat lingkungan internal dan membentuk keunggulan bersaing. Banyak teori yang menekankan betapa pentingnya kualitas lingkungan internal dalam mengatasi persaingan dan menjamin kemandirian usaha mikro.

Pijakan utama adalah pemberdayaan seperti juga diatur dalam UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM dalam Asas, Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan UMKM yang memuat banyak hal dan diantaranya adalah Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Peran Pemerintah, Faktor Modal Usaha dan Faktor Kemitraan. Sehingga dapat mengurai beberapa pertanyaan tentang apakah masing-masing faktor tersebut akan mempengaruhi kemandirian usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Yogyakarta?.

Jawaban dari pertanyaan tersebut diatas menjadi Tujuan dan Manfaat bagi karya tulis ini. Tujuannya adalah sebagai alat menguji variabel-variabel pemberdayaan yang diduga menjadi pengaruh terhadap Kemandirian Usaha Mikro di Kota Yogyakarta dan yang tidak kalah pentingnya adalah Membangun model Pemberdayaan usaha mikro yang lebih tepat dan baik pada penjual jajanan di Kota Yogyakarta. Model yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi acuan dalam pemberdayaan bagi kemandirian usaha kecil sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di Kota Yogyakarta. Sedangkan manfaat yang diharapkan secara teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperluas literature tentang variabel-variabel pengaruh terhadap kemandirian usaha kecil, dan peningkatan kualitas bagi pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta. Manfaat kedua adalah secara aplikatif dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, pemilik modal, dan penulis dalam rangka membantu pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Wlayah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah banyak dilakukan dengan tinjauan melalui berbagai sisi keterkaitan dengan berbagai unsur usaha maupun lembaga pendanaan. Sepertihasil survey yang dilakukan oleh Edi Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo (2011) diperoleh beberapa masalahyang dihadapi oleh UMKM di Provinsi DIY,antara lain: (1) Pemasaran; (2) Modal dan pendanaan;(3) Inovasi dan pemanfaatan teknologiinformasi; (4) Pemakaian bahan baku; (5)Peralatan produksi; (6) Penyerapan dan pemberdayaantenaga kerja; (7) Rencana pengembanganusaha; dan (8) Kesiapan menghadapitantangan lingkungan eksternal. Berkaitan denganberbagai masalah yang dihadapai UMKM,maka diperlukan strategi untuk mengatasinya.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang RI no 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dinyatakan dalam latar belakang bahwa pertama, Masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara RI Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Kedua, Amanat ketetapan MPR RI No. XVI Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi kerakyatan dan ketiga, Pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan dan perlindungan serta pengembangan usaha seluas-luasnya. Sedangkan pengertian usaha Mikro berdasarkan UU RI no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan danataubadan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sbb :

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
- memiliki hasil penjual tahunan paling banyak Rp300.000.000,-

2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang memenuhi kriteria sbb :

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan
- memiliki omzet tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d paling banyak Rp2.500.000.000,-

Jadi jelaslah bahwa usaha dengan kriteria tersebut diatas secara financial dikategorikan sebagai usaha mikro berdasarkan undang-undang no 20 tahun 2008. Usaha mikro ini akan dapat lebih

mampu untuk berdaya jika ada upaya pemberdayaan seperti juga diatur dalam UU no 8 tahun 2008 tentang UMKM dalam Asas, Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

1. Asas pemberdayaan UMKM
2. Tujuan Pemberdayaan UMKM
3. Prinsif Pemberdayaan UMKM

Jelaslah di sini bahwa pemerintah sangat memperhatikan usaha mikro dalam pemberdayaan mereka yang diduga akan memberikan pengaruh terhadap kemandirian usaha itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah juga mengatur bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan melalui aspek pendanaan, Sarana dan Prasarana, Informasi Usaha, Kemitraan, Perizinan Usaha, Kesempatan Berusaha, Promosi Dagang danDukungan kelembagaan

Bahkan pemerintah dan pemerintah daerah mamfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang Produksi Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia dan Desain dan Teknologi.Usaha Mikro sekalipun tidak akan pernah terlepas dari dana/pendanaan, oleh karena itu peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat besar dalam upaya mempermudah masyarakat menikmati fasilitas dari pemerintah berupa modal usaha melalui Pembiayaan dan Penjaminan UMKM yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil melalui BUMN dan BUMS dalam bentuk Pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya, usaha besar Naasional dan Asing, Bantuan luar negeri dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah serta, tidak mengikat, Memberikan insentif dalam bentuk persyaratan perizinan, keringanan, tarif dll.Semua upaya positif ini harus benar-benar diberdayakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Masing-masing faktor pengaruh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau Human Resources mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.(Sonny Sumarsono, 2003).Dalam menghadapi krisis ekonomi nasional seperti saat ini, teori yang berbasis sumber

daya yang menekankan pada penguatan internal sangat relevan bila diterapkan dalam pemberdayaan usaha.Perhatian utama harus ditekankan pada penciptaan nilai tambah untuk meraih keunggulan kompetitif melalui pengembangan kapabilitas khusus (kewirausahaan), sehinggan usaha mikro tidak lagi mengandalkan strategi kekuatan pasar melalui monopoli dan fasilitas pemerintah.Dalam strategi ini, usaha mikro harus mengarahkan pada keahlian khusus secara internal yang bisa menciptakan produk inti yang unggul untuk memperbesar pangsa produksi. Strategi tersebut lebih murah dan ampuh dalam mengembangkan usaha, karena pengusaha mikro dapat memanfaatkan sumber daya lokalnya.

2. Peran Pemerintah

Peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana produksi sangat diperlukan terutama untuk menciptkan iklim usaha yang kompetitif. Hill (1995) menyatakan bahwa kunci untuk membuat usaha kecil menjadi efisien dan dinamik adalah menciptkan iklim usaha yang kondusif tanpa membuat pelaku usaha terus bergantung pada bantuan- bantuan khusus pemerintah. Iklim usaha yang kondusif meliputi tersedianya saran transportasi dan komunikasi, fasilitas usaha yang menunjang, persaingan yang jujur, peraturan persaingan yang fair dan peraturan-peraturan yang adil merupakan faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha kecil (Chew, 1996).

Mengenai pola pikir dan pandangan hidup atau paradigma, pada umumnya pelaku usaha memiliki paradigma tradisional dan cenderung menutup diri terhadap perubahan dan inovasi.Mereka sangat fanatik dengan produk yang dihasilkan sehingga merasa cepat puas diri dengan hasil yang dicapai, yang berakibat “lupa” mengantisipasi perubahan di sekitarnya.Keinginan pasar yang terus berkembang tidak merangsang pengusaha untuk memodifikasi produk yang mereka hasilkan, sebab menurut mereka belum tentu membawa keuntungan pada barang yang dihasilkan tersebut.Dengan adanya pola pikir seperti ini barang yang mereka produksi cenderung bersifat statis baik bentuk, rupa maupun manfaat yang dapat diperoleh.Selain itu, pada umumnya keterbatasan jiwa kewirausahaan pengusaha, seperti melihat peluang pasar, keberanian menaggung resiko, kurangnya motivasi dan etos kerja yang rendah tetap merupakan dilemma.

Karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah dalam membangkitkan semangat wirausaha melalui banyaknya kemudahan dari berbagai peraturan ataupun birokrasi yang ada serta kemudahan pelaku usaha mikro menikmati fasilitas umum yang mempu menunjang berlangsungnya usaha.Besar harapan dari pelaku usaha untuk dapat menambah banyak

pengetahuan tentang lingkungan eksternal seperti lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan perlindungan keamanan dari pemerintah.

Satu hal penting berkaitan dengan peran pemerintah adalah terbukanya akses yang mudah bagi pelaku usaha untuk belajar dari pelaku usaha lain yang memiliki usaha setara atau lebih besar namun lebih baik dan sudah lebih sukses. Hal ini akan membuka luas cakrawala berfikir pelaku usaha dan akan memberikan semangat yang lebih besar lagi dalam berusaha yang pada akhirnya akan menularkan semua yang diperoleh pada lingkungan sekitarnya sehingga benar-benar dapat membantu pemerintah mengatasi pengangguran.

Di samping itu, sebagian besar pelaku usaha mikro masih rendah tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki.Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya.Akibatnya pelaku usaha kurang mampu mengelola keuangannya dengan baik, mereka pada umumnya tidak memisahkan antara dana untuk usaha dan dana untuk keperluan pribadi, sehingga usahanya tidak dapat berjalan lancar. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan keahlian masyarakat yang masih rendah.

Dengan demikian, untuk dapat berkembang maju tanpa perbaikan kualitas faktor sumberdaya manusia adalah hal yang mustahil dapat tercapai, sehubungan dengan itu pendidikan dan ketrampilan menjadi sesuatu yang perlu (Jhingan, 2004).Pendidikan merupakan faktor penting untuk mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan serta motivasi untuk maju, maka merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengushaa kecil ini melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan.

3. Modal Usaha

Masalah keterbatasan modal, baik modal kerja maupun untuk investasi bagi pengembangan usaha mikro tetap merupakan hambatan. Keterbatasan modal, terutama disebabkan oleh tidak adanya akses langsung para pelaku usaha mikro terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) mapun non bank. Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau seluruh dana yang diperlukan untuk investasi perluasan usaha atau peningkatan volume produksi dan investasi untuk penambahan modal kerja berasal dari sumber pendanaan informal (Yusi dan Zakaria, 2005).

Dengan keterbatasan modal yang dimiliki, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan produktivitas menjadi terhambat.Mutu produk yang kadang seadanya dengan jumlah yang dihasilkan tebatas mengakibatkan peluang pasar yang tadinya dapat mereka raih menjadi terlewatkan.Dukungan modal berupa pembiayaan dan penjaminan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha untuk mengembangkan

usahanya.Modal memainkan peranan yang sangat dominan dalam pengembangan usaha (Longenecker, 1998).

4. Kemitraan

Pengertian kemitraan secara konseptual adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat,dan menguntungkan (Soemardjo, 2004). Saling memerlukan berarti bahwa pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi dan bimbingan. Saling memperkuat berarti pelaku usaha bersama-sama melaksanakan etika bisnis sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan saling membutuhkan sehingga memperkuat kesinambungan dalam bermitra (Martodireso dan Widada, 2002). Saling memerlukan berarti bahwa pelaku usaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi. Saling menguntungkan berarti pelaku usaha memperoleh peningkatan pendapatan disamping adanya kesinambungan dalam usaha.Sedangkan maksud dan tujuan pola kemitraan (kusnaedi, 1984) adalah sebagai berikut:

1. Mengatur kerjasama yang seimbang dan saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
2. Memberikan iklim usaha yang lebih baik pada pelaku usaha mikro
3. Mendorong terciptanya pemerataan besudaha dan peningkatan pendapatan semua pihak.

Dengan semakin besarnya kesadaran dari beberapa negara bahwa kenyataan menunjukkan adanya kontribusi besar yang dapat disumbangkan oleh industri kecil dan mikro pada lapangan kerja dan penghasilan (chapra, 2000). Bahkan dari negara-negara maju seperti italia, Jerman dan Jepang malah lebih dulu menyadari potensi usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan lapangan kerja serta memperkenalkan tindakan-tindakan untuk menggalakkan industri mikro dan kecil dengan konsep kemitraan dengan industri menengah dan besar (Perry, 1999). Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk kemitraan yang bertujuan agar para pelaku usaha mikro tidak terpinggirkan, tetapi dapat diberdayakan sebagai salah satu pilar pembangunan diberbagai daerah. Kemitraan tersebut dibangun dalam satu kondisi pasar yang sehat.Sebenarnya, pada masa lalu, telah banyak dibuat berbagai macam program kemitraan untuk mengembangkan usaha mikro guna mengentaskan kemiskinan.Namun sebagian besar program kemitraan itu tidak berumur panjang, yang bergema hanya pada saat pencanangan program dan kemudian menghilang begitu saja seiring berjalannya waktu.Walaupun demikian,

ada beberapa program kemitraan yang berumur cukup panjang dan dapat menjadi pelajaran dalam membuat program-program kemitraan sebagai upaya memberdayakan dan memperkuat usaha mikro dalam pembangunan sosial ekonomi di berbagai daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak permasalahan mendasar yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan usaha mikro. Faktor ini kadangakala menjadi penghambat kemandirian usaha mikro yang bersangkutan dalam peningkatan omset penjualan, peningkatan asset usaha serta kepastian pasar yang berkesinambungan (Depperindag), 2004). Dari permasalahan yang ada dan pentingnya keberadaan usaha mikro dalam peta perekonomian daerah, maka sudah seharusnya perhatian diarahkan pada upaya pemberdayaan usaha dalam rangka memperkuat lingkungan internal usaha mikro ini. D'Aveni (1998) dan Hamel (1998) berpendapat bahwa perusahaan harus menekankan strategi yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan dan keunikan inovasi yang berbasis pada sumber daya internal untuk menciptakan keunggulan bersaing. Lebih lanjut, pandangan Porter (1997) tentang teori strategi bersaing, dirancang untuk menghadapi tantangan eksternal, khususnya persaingan.Dalam teori persaingan Porter, dikemukanan bahwa untuk menciptakan daya saing, perusahaan harus menciptakan keunggulan melalui strategi generic, yaitu strategi menekankan pada keunggulan biaya rendah, differensiasi dan fokus. Dengan strategi ini, perusahaan akan memiliki daya tahan hidup secara berkesinambungan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro

Pelaku usaha mikro sudah saatnya dijadikan subyek dalam pembanguan sosial ekonomi bukan sekedar obyek. Selama ini peran pengusaha kecil dalam sistem ekonomi nasional belum begitu kelihatan. Perlu upaya yang berkesinambungan untuk mengefektifkan serta mempercepat peningkatan kualitas hidup para pelaku usaha mikro dalam kerangka restrukturisasi dan revitalisasi ekonomi nasional dengan melakukan serangkaian perubahan yang bersifat struktural. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar dari ketergantungan ke kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasikan sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemberdayaan (Sumodiningrat, 1999).

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari Negara berkembang memandang penting pemberdayaan usah kecil dan menengah (Berry, 2001). *Pertama*, karena kinerja usaha kecil dan menengah cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja produktif.*Kedua*,

sebagai bagian dari dinamika, usaha kecil dan menengah sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan teknologi.*Ketiga*, karena sering diyakini bahwa usaha kecil dan menengah memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar.Tentu saja usaha mikro tidaklah jauh dari itu juga.

Perlunya pemberdayaan usaha mikro tersebut dikarenakan usaha mikro di Indonesia sangat berbeda dengan ushaa mikro di negara maju.Usaha kecil di Indonesia umumnya masih sangat terbatas dalam banyak segi misalnya sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, menggunakan teknologi tradisonal yang umumnya direkayasa sendiri dan akses ke informasi mengenai pasar dan teknologi sangat minim. Sedangkan di negara-mengara maju menunjukkan bahwa usaha mikro adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan wirausaha yang kreatif dan inovatif, penciptaan tenaga kerja trampil dan fleksibilitas proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan pasar yang cepat (Sengenberger, 1995; Schmitz, 1995).

Pemberdayaan usaha kecil sebagai ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan strategi pertumbuhan. Kebijaksanaan yang hanya mengandalkan pertumbuhan terbukti justru memperlebar jurang kesenjangan. Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural (*structural adjustment* atau *structural transformation),* dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

Di negara maju seperti Amerika dukungan terhadap pembangunan usaha kecil pun dilakukan.Komitmen pemerintah AS dalam mengembangkan sektor ushaa kecil terlihat dalam pemberitahuan Small Business Administration (SBA) oleh pemerintah federal pada tahun 1953.Hasil penelitian dari Hu dan Schive (1996) di Taiwan telah menunjang kenyataan di atas. Peranan pemerintah yang sangat pro aktif dengan kebijakan-kebijakan industrinya yang sangat berorientasi global dan konsisten, yang menciptakan baik kerja sama bisnis yang erat maupun kompetisi yang jujur antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar serta penyediaan berbagai fasilitas untuk menunjang perkembangan sektor usaha kecil telah menyebabkan usaha kecil dan menengah berkembang maju.

India dapat dikatakan sebagai negara pertama di Asia yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan usaha mikro, khususnya di pedesaan yang disebut Khadi & Village Industries. Setelah merdeka pada tahun 1948, pemerintah India mengeluarkan *the indystrial policy resolution* sebagai dasar kebijakan pembangunan dan pertumbuhan industri nasionalnya, termasuk skala kecil (Bhargava, 1996).

Dalam menghadapi era perdagangan bebas, diperlukan suatu strategi baru dalam pembangunan industri kecil yang lebih efektif dan berorientasi pasar global (*global market oriented)*, bukan lagi orientasi politis dan sosial (*social and political oriented*) dengan tujuan semata-mata untuk mengurangi kesenjangan. Strategi baru ini harus mengandung kebijakan-kebijakan pengembangan usaha kecil yang bisa menempatkan posisi kelompok usaha.Hal ini sebagai salah satu tulang punggung dunia usaha nasional pada umumnya.Strategi ini dimulai dari upaya penguatan lingkungan internal usaha kecil yang bersangkutan.

6. Kemandirian Usaha

Rendahnya tingkat pendidikan para pengusaha kita, khususnya UKM membawa dampak pada berbagai masalah yang dihadapi oleh UKM. Masalah-masalah tersebut adalah: (a) kekurangmampuan akses dan perluasan pangsa pasar; (b) kekurangmampuan akses pada sumber-sumber pendanaan, khususnya bank; (c) keterbatasan akses pada informasi; (d) kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan alih teknologi; dan (e) kelemahan dalam pengelolaan organisasi dan manajemen.

Secara umum, jika dicermati, UKM itu cenderung mengembangkan bisnisnya "*one man show*".Karena pengelolaan bisnisnya dilakukan sendiri, sehingga tingkat produktivitas usahanya sangat rendah.Bahkan tidak jarang UKM kurang memperhatikan kualitas dan disain produknya.

Permasalahan tersebut diatas, tentunya akan mempengaruhi daya saing UKM di masa depan. Terlebih lagi dalam era globalisasi yang kita hadapi ke depan, yang tidak mengenal lagi batas-batas antar negara dan dengan didukung oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat akan menyebabkan aliran barang ibarat air mengalir dari hulu ke lembah, begitulah akan terjadi aliran barang dan jasa dari negara lain ke negara kita. Oleh karena itulah, Koperasi dan UKM (KUKM) harus ditingkatkan kemampuannya agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Demikian juga dalam era otonomisasi.Dalam era otonomisasi ini peran pemerintah pusat tidak seperti pada era sebelumnya yang sentralistis.Masing-masing daerah bebas mengembangkan kreasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pada era otonomisasi ini pula masing-masing KUKM akan memperoleh perlakuan yang berbeda sesuai dengan kapasitas daerah dimana KUKM itu berada.

Pada daerah yang mampu dari segi pendanaan kalau ditunjang oleh konsep yang jelas dalam pemberdayaan KUKM akan mampu menghasilkan KUKM yang tangguh sesuai dengan potensi daerah bersangkutan. Sebaliknya, pada daerah yang miskin akan terjadi keterbatasan dalam upaya pemberdayaan KUKM di daerah bersangkutan. Kalau hal ini terus kita biarkan, tanpa

adanya motivasi yang tinggi dari masing-masing pelaku usaha untuk maju, maka mereka akan selalu kalah bersaing dengan pelaku usaha yang lain, di dalam dan luar negeri.

Disamping menghadapi tantangan tersebut, daya saing Indonesia sendiri juga masih ketinggalan dari Negara lain, termasuk di ASEAN. Pada tahun 2013 posisi daya saing Indonesia sudah semakin baik, yakni menduduki urutan ke 38 dari 149 negara yang disurvei. Posisi Indonesia masih berada pada urutan ke-5 di ASEAN, setelah Singapura (ke-2), Malaysia (ke-24), Brunei Darussalam (ke-26), dan Thailand (ke-37).

Dibalik tantangan tersebut sebenarnya ada potensi peluang yang sangat besar.Namun demikian, hal ini sangat tergantung pada bagaimana kita mampu menggali dari potensi yang ada tersebut. Beberapa peluang yang ada diantara tantangan tersebut adalah adanya blok atau kawasan/wilayah perdagangan dan investasi yang bebas. Di kawasan ASEAN kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 nanti. Di kawasan Asia dan Pasifik ada APEC, yang bagi anggota ekonomi sedang berkembang seperti Indonesia akan kita masuki pada tahun 2020. Kawasan perdagangan dan investasi regional ini dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi bisnis.

Kemandirian usaha, termasuk para pelaku UKM, sudah merupakan suatu keharusan terlebih menghadapi tantangan global saat ini dan nanti.Menghadapi persaingan yang ketat, pelaku usaha harus mampu menentukan strategi yang jitu dalam memenangkan persaingan. Para pelaku usaha harus bisa berhadaptasi dengan kecenderungan yang terjadi, yakni:

1. karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, dan bentuk organisasi yang cenderung membentuk jejaring (network);
2. tingkat industri yang pengorganisasian produksinya fleksibel dengan pertumbuhan yang didorong oleh inovasi/pengetahuan; didukung teknologi digital; sumber kompetisi pada inovasi, kualitas, waktu, dan biaya; mengutamakan research and development; serta mengembangkan aliansi dan kolaborasi dengan bisnis lainnya.

.

Sasaran ini menjadi penting karena pada masa ini dan khususnya memasuki MEA 2015 dan APEC maka orientasi keterbukaan dan mekanisme pasar bersama-sama akan menempatkan kemampuan menghasilkan unggulan -- menjadi kompetitif, menjadi dasar keberhasilan.Sehubungan dengan hal tersebut, maka semua upaya pengembangan perlu difokuskan kepada kompetensi - bagaimana kita menumbuhkan kemampuan dan sikap yang perlu ditumbuhkan untuk keberhasilan. Mengingat data statistik di atas, maka perlu untuk memfokuskan upaya kepada kelompok kecil/menengah yang sudah dalam lingkungan ini agar dapat memperkuat kemampuan mereka.Mengeluarkan kelompok usaha rakyat dilingkungan

pertanian dan mengkhususkan dalam usaha non-pertanian sebagai sasaran pembinaan yang dengan sadar dipilih.Tidak berarti usaha kecil kebawah tidak penting - usaha kecil dan mikro seperti juga usaha pertanian perlu ditangani secara khusus.Dalam pemberdayaan mereka memerlukan mesin pengembangan yang harus ada dalam dunia usaha itu sendiri. Kita memerlukan suatu fokus - yang kemudian dapat menjadi penghela dari sektor yang lain - yang sebagian besar masuk lingkungan mikro yang usahanya seringkali seadanya - tidak dapat berinisiatif untuk menetapkan strategi apa yang hendak dikembangkan untuk mencapai hasil yang dicitakan.

Pendekatan pengembangan yang perlu diambil tentu lebih bersifat komprehensif dimana berbagai pengembangan melalui pelatihan dipadukan dengan pengembangan yang bersifat pengalaman (experiential approach) dan lingkungan serta infra struktur yang mendukung.
Bagian yang penting dari Kompetensi Perdagangan Luar Negeri ini adalah kemampuan pengusaha untuk mengembangkan jaringan usaha (networking) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro di beberapa lokasi yang ada di wilayah kota Yogyakarta yang menjual produk jajanan, khususnya wilayah Wirobrajan, Kauman dan Pakuncen. Para penjual ada yang mangkal dilokasi tertentu ada yang berkeliling menetap. Dari populasi yang ada tersebut maka dalam penelitian ini akan diambil sampel dengan didasarkan cluster sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kelompok. Yaitu kelompok pelaku usaha mikro yang menjual jajanan pada beberapa lokasi yang ada di kota Yogyakarta, Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 kelompok pelaku usaha dan masing-masing kelompok terdiri dari 20 penjual jajanan, jadi jumlah sampel yang diambil adalah 200 responden pengujian keseluruhan hipotesis. Kelompok tersebut adalah:

1. Bakso dan Mie Ayam 20 penjual
2. Batagor, Cilok dan Cireng 20 penjual
3. Tempura, 20 penjual
4. Angkrigan, 20 penjual
5. Jajan Pasar, 20 penjual
6. Pecel Lele dan Ayam bakar, 20 penjual
7. Es Kelapa Muda, es campur dan Jus, 20 penjual
8. Siomay, 20 penjual
9. Warung makan/ lesehan, 20 penjual

10. Sate dan tongseng 20 penjual

Hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: Variabel Sumber Daya Manusia mempengaruhi Kemandirian Usaha Mikro

Sumber Daya Manusia menjadi variable penting karena usaha Mikro sangat tergantung kepada faktor manusia yang menjalankan dan sangat belum bergantung kepada mesin sehingga kualitas Sumber Daya Manusia menjadi penentu bagi berdayannya sebuah usaha mikro baik itu pemilik usaha maupun karyawan usaha yang ikut ambil bagian dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Variabel Sumber Daya Manusia diduga akan memberikan pengaruh terhadap kemandirian melalui upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan misalnya dengan melakukan training manajemen, training akuntansi, training motivasi, dan training-training yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan

Hipotesis 2: Variabel Peran Pemerintah mempengaruhi Kemandirian usaha Mikro

Pemerintah pusat dan daerah memberikan peran yang sangat kuat terhadap kemampuan usaha mikro untuk terus berdaya karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha mikro akan berdampak langsungkepada upaya pemberdayaan misalnya dengan mengeluarkan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi usaha mikro, memberikan sarana dan prasarana seperti tempat usaha, peralatan, mesin yang mudah didapat, membantu menghubungkan dengan pihak-pihak yang concern terhadap pelaku usaha mikro, membuka kesempatan yang luas bagi peningkatan SDM seperti memberikan pelatihan gratis bagi pelaku usaha mikro.

Hipotesis 3: Variabel Modal Usaha mempengaruhi Kemandirian Usaha Mikro

Selama ini modal usaha menjadi momok bagi usaha mikro karena mereka merasa sulit mendapatkan pinjaman modal kalaupun ada bunganya sangat tinggi sehingga pelaku usaha tidak mampu melakukan pembayaran atau cicilannya, bahkan seringkali diminta berbagai persyaratan seperti agunan yang memberatkan.Modal Usaha yang lebih mudah didapatkan karena syarat pencairannya yang mudah dan bunga yang ringan menjadi dambaan para pelaku usaha. Dengan demikian mereka akan lebih mudah dalam menjalankan usahanya hal ini akan mampu memberdayakan usaha mikro misalnya dengan cara meningkatkan peran perbankan baik bank nasional maupun daerah untuk lebih memperhatikan usaha mikro, meningkatkan peran koperasi sebagai soko guru bagi berkembangnya usaha mikro yang pada akhirnya modal usaha ini mampu memandirikan usaha mikro.

Hipotesis 4: VariabelKemitraan mempengaruhi Kemandirian Usaha Mikro

Di Indonesia tidaklah sedikit para pelaku usaha dengan skala diatas usaha mikro dimana mereka memiliki pengalaman dan kekuatan dalam banyak faktor dapat membantu mengentaskan usaha mikro menjadi lebih berdaya dan akhirnya mampu mandiri. Keterlibatan peran para mita selevel atau yang lebih diatasnya akan sangat menggairahkan potensi keberdayaan usaha mikro dan sudah barang tentu pengaruhnya bias sampai kepada geliat ekonomi nasional yang mampu memperkuat kemakmuran Negara.

Hipotesis 5:VariabelSumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan saling mempengaruhi dan secara bersama-sama memberikan pengaruh kepada Kemandirian Usaha Mikro

Antar variabel memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi hal ini tentu saja akan berdampak pada Kemandirian Usaha. Pemberdayaan melalui peningkatan SDM misalnya juga harus mendapatkan dukungan dari peran Pemerintah, membutuhkan modal usaha dan terkait dengan kemitraan pastinya. Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan banyak peran jika pelaku usaha itu sendiri bersifat aktif dalam variabel-variabel terkait.

Metode Penelitian menggunakan alat analisa SPSS melalui analisis-analisis sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis hipotesis pengaruh masing-masing faktor Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, Kemitraan, karena adanya Pemberdayaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro jajanan baik secara serentak maupun parsial digunakan analisis Model regresi Linier Berganda. Menurut Gujarati (1997 : 28) model regresi untuk menganalisis data memakai rumus sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Dalam penelitian ini variabel bebas (X) dana variabel terikat (Y) ditentukan sebagai berikut :

Yi = Kemandirian UsahaX_1 = Sumber Daya Manusia X_2 = Peran Pemerintah

X_3 = Modal Usaha X_4 = Kemitraan

B_0 = Intersep. Konstanta yang merupakan rata-rata nilai Yi pada saat X_1, X_2, X_3 dan X_4 sama dengan nol

B_1 = Koefisien regresi parsial, mengukur nilai rata-rata Yi untuk tiap unit perubahan dalam X_1 dengan menganggap X_2, X_3 dan X_4 konstan

B_2 = Koefisien regresi parsial, mengukur nilai rata-rata Yi untuk tiap unit perubahan dalam X_2 dengan menganggap X_1, X_3 dan X_4 konstan

B_3 = Koefisien regresi parsial, mengukur nilai rata-rata Yi untuk tiap unit perubahan dalam X_3 dengan menganggap X_1, X_2 dan X_4 konstan

B_4 = Koefisien regresi parsial, mengukur nilai rata-rata Yi untuk tiap unit perubahan dalam X_4 dengan menganggap X_1, X_2 dan X_3 konstan

2

Berikut gambar model penelitian yang akan menjadi acuan kerangka pikir bagi peneliti:

Gambar 1

Model Penelitian

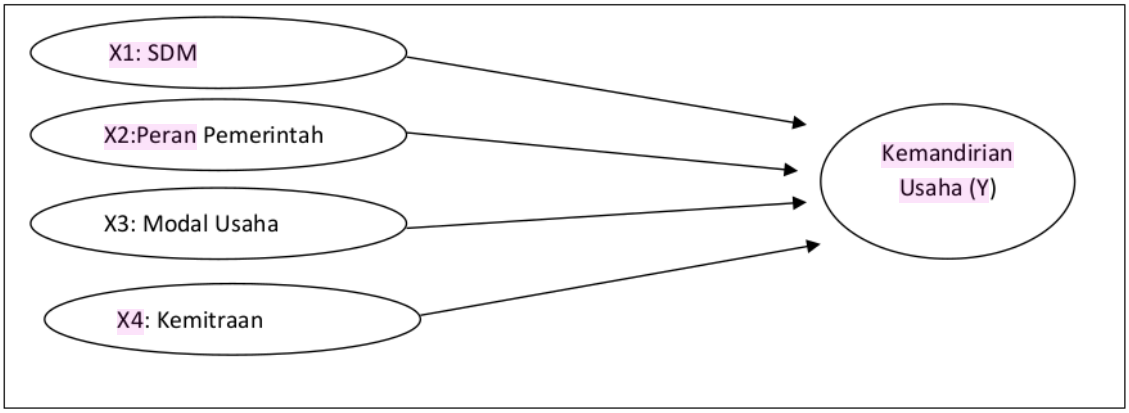

Variabel-variabel yang akan terkait dalam metode peelitian ini adalah sebagai berikut:

Y: Kemandirian Usaha

X1: Sumber Daya Manusia

X2:Peran Pemerintah

X3: Modal Usaha

X4: Kemitraan

HASIL PENELITIAN

Hasil survey terhadap sampel penelitian yaitu 200 pelaku usaha jajanan di wilayah kota yogyakarta khususnya di wilayah Wirobrajan, Pakuncen dan Kauman dan memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2:Data Berdasarkan Kependudukan

No	KTP	Domisili	Jumlah	Prosentase
1	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	20	10%
2	DIY	Kota Yogyakarta	120	60%
3	Luar DIY	Kota Yogyakarta	60	30%
TOTAL			200	100%

Tabel 3:Data Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	70	35%
2	SMP	80	40%
3	SMA	40	20%
4	D3	8	4%
5	S1	2	1%
		200	100%

Tabel 4 :Data Berdasarkan Lokasi Jualan

No	Lokasi	Jumlah	Prosentase
1	Sekolah	85	42,5%
2	Tempat Wisata	79	39,5%
3	Umum	22	11%
4	Rumah sendiri	14	7%
TOTAL		200	100%

Melihat kenyataan tersebut sangat perlu upaya pemberdayaan dari berbagai faktor yang penting yaitu Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan agar tercipta Kemandirian Usaha bagi para pelaku usaha jajanan tersebut.

A. Analisis Regresi Berganda

Hasil Analisa Regresi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 5:Cooefficient Re gresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.483	1.729		.858	.392
	Sumber Daya Manusia	.129	.034	.187	3.761	.000
	Peran Pemerintah	.331	.035	.492	9.565	.000
	Modal Usaha	.160	.030	.267	5.320	.000
	Kemitraan	.165	.031	.267	5.289	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Usaha

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$

Diketahui: α= 1,483

β_1 = 0,129 β_2 = 0,331 β_3 = 0,160 β_4= 0,165

Maka Persamaan Regresi Berganda yang dihasilkan dari analisis ini adalah:

$Y = 1{,}483 + 0{,}129X_1 + 0{,}331X_2 + 0{,}160X_3 + 0{,}165X_4$

Hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. B_0 = Constant yang merupakan rata-rata nilai Y pada saat X_1, X_2, X_3, , dan X_4 = 0 artinya Meskipun tanpa adanya variable-variabel Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, dan Kemitraan, vzriabel Kemandirian Usaha para pelaku Usaha Mikro sudah ada dan terbukti positif sebesar 1,483
2. B_1 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X_1 (Sumber Daya Manusia) dengan menganggap X_2, X_3, dan X_4, konstan artinya jika variabel Sumber Daya Manusia positif (0,129) maka akan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha.
3. B_2= koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X_2 (Peran Pemerintah) dengan menganggap X_2, X_3, , dan X_4 konstan artinya jika Peran Pemerintah positif (0,331) maka akan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha
4. B_3 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X_3 (Modal Usaha) dengan menganggap X_1, X_2, dan X_4, konstan artinya jika Modal Usaha positif (0,160) maka akan berpengaruh terhadap positif terhadap Kemandirian Usaha

5. B_4 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X_4 (Kemitraan) dengan menganggap X_1, X_2, dan X_3, konstan artinya jika Kemitraan positif (0,165) maka akan berpengaruh terhadap positif terhadap Kemandirian Usaha

Jadi berdasarkan Analisis Regresi Berganda dihasilkan H_1: $B_0 \neq 0$ maka H_1 dinyatakan diterima dan menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dari keempat variable yaitu Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan terhadap Kemandirian Usaha.

1. Analisis Uji Hipotesis

a). Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji validitas isi (content validity) yang menunjukkan seberapa besar item-item instrument mewakili indicator yang diukur. Melalui analisa olah data yang dilakukan menggunakan SPSS dihasilkan Nilai Output pada Total Correlation adalah r hitung, selanjutnya dibandingkan dengan r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data n = 30 maka diperoleh r tabel adalah sebesar 0,361

Kesimpulannya data korelasi yang dihasilkan valid jika berada diatas r tabel (semua variabel menghasilkan corrected item-total correlation > dari 0,361) dan data korelasi tidak valid jika dibawah dari r tabel (tidak di temukan). Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa data yang digunakan dalam analisa adalah data yang valid. Validitas ang dihasilkan dapat dibuktikan melalui uji Korelasi dan dihasilkan hubungan yang kuat antara masing-masing variabel independent dengan variabel dependent yang masing-masing menghasilkan parseon correlation Uji Reabilitas

Untuk melakukan Uji Reabilitas Instrumen menggunakan output yang telah diuji validitasnya dan diambil 30 sampel kuisioner sehingga menghasilkan nilai alpha pada masing-masing item yaitu pada kolom Cronbach's if item delete. Sedangkan untuk koefisien Cronbach's Alpha secara simultan atas 4 item ditunjukkan pada tabel reliability coefficients yang berada dibawahnya (Gendro Wiyono, 2011)

Tabel 6 :Output Cronbach's Alpha semua Variabel

No	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item
1	Sumber Daya Manusia	.840	6
2	Peran Pemerintah	.820	6
3	Modal Usaha	.794	6
4	Kemitraan	.876	6
5	Kemandirian Usaha	.859	6

Output dari Reability Analysis tidak lain adalah Item-Total Statistics, yang menghasilkan nilai- nilai Alpha pada kolom Cronbach/s Alpha If Item deleted, untuk masing-masing Item dan menghasilkan nilai Alpha Simultan/ komposit pada tabel Reability Statistik yang berada dibawahnya. Nilai Alpha ini dibandingkan dengan r tabel yang dicari dengan signifikancy 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 30 diperoleh nilai r tabel 0,361.Tampak bahwa Alpha yang dihasilkan lebih besar dari pada r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai item secara parsial maupun secara komposit dinyatakan reliabel.

b). Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Hasil Keluaran untuk Uji F menggunakan Alat Analisis Independen ANOVA[a]

Tabel 7

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	630.097	4	157.524	55.058	.000[a]
	Residual	557.903	195	2.861		
	Total	1188.000	199			

a. Predictors: (Constant), Kemitraan, Sumber Daya Manusia, Modal Usaha, Peran Pemerintah

b. Dependent Variable: Kemandirian Usaha

Hasil keluaran ANOVA menunjukkan bahwa *Degree of Freedom* yang digunakan adalah 4 dengan Probabilitas 0,05 dan n = 200 maka dalam F tabel diperoleh nilai sebesar 2,26 sedangkan F hitung yang dihasilkan sebesar 55,058 sehingga F Hitung lebih besar dari pada F tabel (F hitung > F tabel)

Dengan demikian sehingga dapat disimpulkan bahwa;

H_a diterima karena terdapat hubungan saling memberikan pengaruh antara variable independent (bebas) dengan variable dependent (terikat). Dalam hal ini semakin besar F Hitung maka semakin sama populasi yang digunakan.

c). Uji T

Uji T dapat juga dikatakan sebagai Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan.

Tabel 8

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.483	1.729		.858	.392
	Sumber Daya Manusia	.129	.034	.187	3.761	.000
	Peran Pemerintah	.331	.035	.492	9.565	.000
	Modal Usaha	.160	.030	.267	5.320	.000
	Kemitraan	.165	.031	.267	5.289	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Usaha

Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut :

Ha = B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 ≠ 0 artinya ada pengaruh bermakna antara X dengan Y dengan menggunakan tingkat keyakinan 172,9% (lebih dari 100%) kemudian dibandingkan t hitung dengan t tabel. Besarnya tingkat keyakinan akan berpengaruh terhadap nilai Z (nilai t). Semakin besar tingkat keyakinan maka akan semakin besar pula nilai t (Gendro Wiyono, 2011).

Karena t tabel yang dihasilkan pada probabilitas 0,05 uji 2 sisi dan N 200 adalah 1,6525 sedangkan pada probabilitas 0,025 uji satu sisi adalah 1,9719, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa:T hitung > t tabel

Sehingga hipotesa yang menjadi kesimpulannya adalah: H_a diterima bahwa keempat variable independent (bebas) memberikan pengaruh terhadap variable dependent (terikat).

Analisis Regresi menghasilkan Hipotesa sebagai berikut:

1. Variabel Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh positif terhadap Variabel Kemandirian Usaha, B_1 positif dan t serta F hitung > t dan F tabel.
2. Variabel Peran Pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap Variabel Kemandirian Usaha, B_2 positif dan t serta F hitung > t dan F tabel.
3. Variabel Modal Usaha memberikan pengaruh positif terhadap Variabel Kemandirian Usaha, B_3 positif dan t serta F hitung > t dan F tabel.
4. Variabel Kemitraan memberikan pengaruh positif terhadap Variabel Kemandirian Usaha B_4 positif dan t serta F hitung > t dan F tabel

Keempat Variabel Independen (Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan) secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Kemandirian Usaha terbukti bahwa correlasi yang dihasilkan adalah 1 dengan kata lain hubungannya sangat kuat. Dengan demikian dihasilkan Model yang dapat diterapkan sebagai berikut:

Gambar 2:Model Pemberdayaan Usaha Mikro

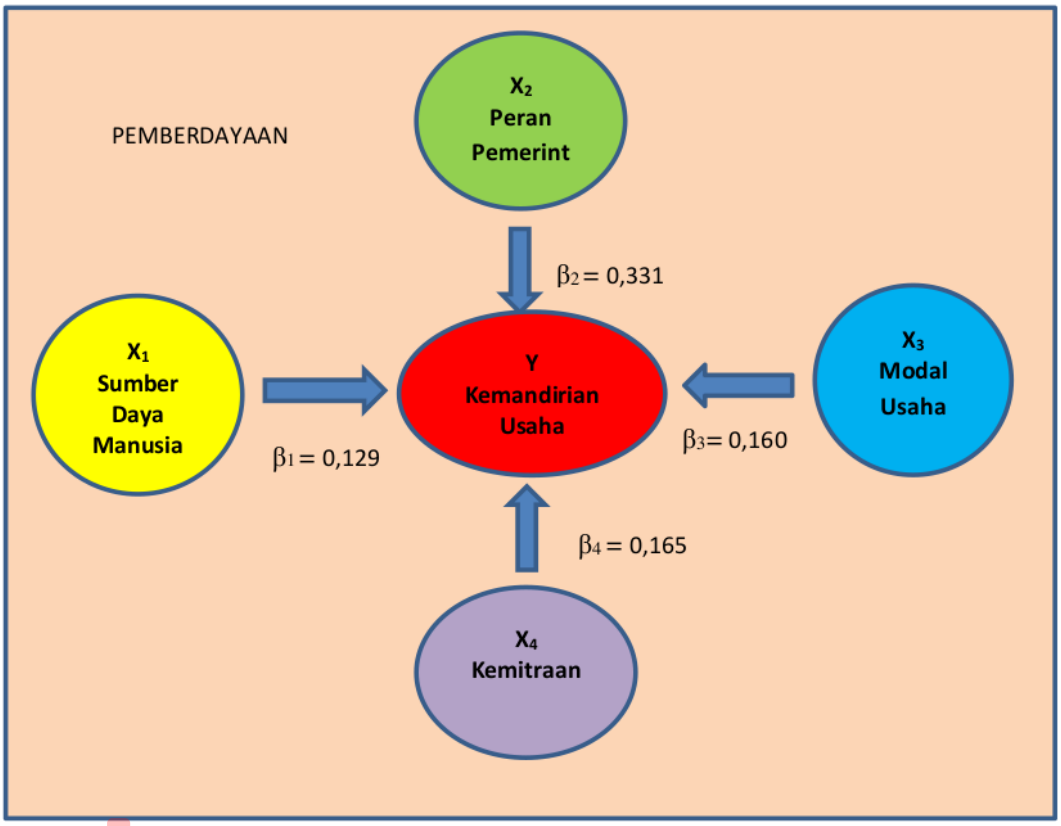

Pemberdayaan usaha mikro yang dapat diterapkan melalui keempat variabel (Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, dan Kemitraan) harus benar-benar dimaksimalkan terbukti bahwa βyang dihasilkan positif artinya variabel-variabel pengaruh kuat mempengaruhi variabel independent (Kemandirian Usaha). Pertama, Variabel Sumber Daya Manusia dengan β_1 = 0,129 jika pemberdayaan yang dilakukan semakin baik dan tepat pada sasaran maka Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro akan semakin baik. Kedua, Variabel Peran pemerintah menunjukkan pengaruh yang positif kuat dengan β_2 = 0,331 mempengaruhi Kemandirian Usaha, jika upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah tepat guna dan tepat sasaran pada pelaku usaha mikro terutama pelaku usaha jajanan maka akan sangat berperan dalam mempengaruhi Kemandirian usaha. Ketiga, Variabel Modal Usaha dengan β_3= 0,160 memberikan pengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha dengan demikian peran pemberdayaan melalui Variabel ini harus benar-benar di maksimalkan fungsinya sehingga benar-benar berpengaruh langsung terhadap para pelaku usaha mikro jajanan sehingga mereka akan mampu memiliki Kemandirian Usaha secara finansial. Variabel keempat, adalah Variabel Kemitraan dimana β_4 = 0,165 memberikan pengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha maka

jika peran kemitraan ini di maksimalkan akan banyak memberikan sumbangan terhadap Kemandirian Usaha bagi para pelaku usaha mikro khususnya kemitraan yang dibangun para pelaku usaha jajanan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dari sisi Sumber Daya Manusia masih harus ditingkatkan karena SDM yang dimiliki para pelaku usaha mikro (penjual jajanan) memang relative rendah, data dari hasil kuisioner berdasarkan tingkat pendidikanmenunjukkan hasil tingkat pendidikan SD sebesar 35%, SMP 40%, SMA 20% dan D3 4%, dan S1 1% kondisi ini berpengaruh terhadap Kemandirian Usaha dalam artian latar belakang pendidikan yang rendah mengakibatkan berbagai persoalan seperti:
   (a) Kekurangmampuan akses dan perluasan pangsa pasar;
   (b) Kekurangmampuan akses pada sumber-sumber pendanaan, khususnya bank;
   (c) Keterbatasan akses pada informasi;
   (d) Kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan alih teknologi; dan
   (e) Kelemahan dalam pengelolaan organisasi dan manajemen.dan
   (f) Kurang peduli terhadap lingkungan termasuk masalah kesehatan yang ditimbulkan dari praktek penjualan yang salah.
2. Pemberdayaan melalui Peran Pemerintah sangat berpengaruh terhadap Kemandirian Usaha Karena itu Peran Pemerintah itu perlu dimaksimalkan seperti melalui :
   (a) Campur tangan pemerintah dalam membangkitkan semangat wirausaha yang benar;
   (b) Peran Pemerintah dalam memberikan banyak kemudahan dari berbagai peraturan ataupun birokrasi yang ada;
   (c) Peran Pemerintah memberikan kemudahan pelaku usaha mikro menikmati fasilitas umum yang mempu menunjang berlangsungnya usaha
   (d) Peran Pemerintah dalam pendidikan yang dapat menambah banyak pengetahuan tentang lingkungan eksternal seperti lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan perlindungan keamanan dari pemerintah.
   (e) Peran pemerintah melalui dinas kesehatan semakin memantau kesehatan dan kondisi barang jualan apakah layak jual atau tidak termasuk bagaimana mereka mengelola dagangan kadaluarsa.

3. Pelaku Usaha Mikro (penjual jajanan) kurang memiliki Modal Usaha yang cukup untuk mengembangkan usahanya karena iu Pemberdayaan melalui Modal Usaha akan mempengaruhi Kemandirian usaha, kondisi ini bisa terjadi karena:
   (a). Tidak adanya akses langsung para pelaku usaha mikro terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) mapun non bank;
   (b) Kurangnya dukungan modal berupa pembiayaan dan penjaminan pinjaman modal usaha terkadang mengakibatkan kurangnya kepedulian terhadap mutu dan produktivitas usaha sehingga menjadi terhambat, mutu produk yang kadang seadanya karena konsep berpikir asal mendapat untung saja.
4. Pemberdayaan melalui Kemitraan yang dilakukan para pelaku usaha mikro (penjual jajanan) memberikan pengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha, namun hal ini masih banyak hambatan karena:
   (a). Keinginan yang rendah dari pelaku usaha mikro untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pelaku usaha lain baik seformat maupun dengan format diatasnya;
   (b) Memiliki pola pikir bahwa dengan berorganisasi mereka beranggapan akan membuang-buang waktu saja
   (c) Sudah merasa cukup dengan apa yang dijalaninya selama ini.

B. Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya bagi Dinas yang terkait untuk :

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus melakukan pengecekan langsung dan rutin ke penjaja jajanan berkitan dengan masalah kesehatan makanan yang dijual belikan, termasuk makanan kadaluarsa dan lokasi tempat jualan yang tidak mengganggu kepentingan umum.
2. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta harus meningkatkan pelatihan tentang berbagai hal yang mereka perlukan untuk semakin meningkatkan kualitas SDM dengan sedikit paksaan agar mereka mau hadir.
3. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus melarang dengan tegas penjualan makanan jika terbukti tidak sehat
4. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta harus semakin memberikan banyak jalur kemudahan dalam pemberian pinjaman dana dengan jaminan dari pemerintah kota Yogyakarta
5. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta harus membantu memberikan wadah jika memungkinkan membentik Asosiasi bagi kelompok usaha jajanan agar semua saran diatas

dapat tersampaikan dengan lebih mudah sehingga Kemandirian Usaha semakin dapat dirasakan.

6. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus mengeluarkan Sertifikasi Layak atau minimal terdaftar dan diberikan bukti kelayakan jual dari dinas kesehatan terhadap para Penjaja Jajanan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta, salah satu contoh secara teknis dengan penampilan gerobak yang bersih dan menarik, penampilan penjual yang bersih dengan menggunakan celemek dan sarung tangan
7. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta harus menghimbau kepada pihak-pihak sekolah secara lebih luas agar lebih memprioritaskan adanya kantin sehat
8. Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kota Yogyakarta secara bersama-sama harus dapat menghimbau kepada pihak sekolah untuk benar-benar memantau dan mentertibkan para penjaja jajanan di depan sekolah dan akan lebih baik lagi jika hanya kepada para penjual jajanan yang memperoleh surat ijin resmi dari sekolah yang bisa berjualan di depan sekolah yang bersangkutan, karena berdasarkan survey sebanyak 42,5% penjual berada dilingkungan sekolah.
9. Pihak Sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMU harus berani mengikuti jejak sekolah-sekolah sebelumnya dalam upaya tegas membuat kantin sehat dengan mengajak partisipasi orang tua mengisi kantin dengan buatan mereka dengan tanggung jawab penuh bahwa makanan yg dibuat adalah makanan sehat.
10. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama BPOM secara simultan melakukan tes kesehatan makanan terhadap makanan yg dijual oleh usaha jajanan sehingga akan tercipta rasa takut jika menjual makanan tidak sehat/ berbahaya, karena accaman sangsi akan diberikan jika pelanggaran ini dilakukan.

Muda Setia

ORIGINALITY REPORT

95%	96%	12%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	49%
2	eprint.stieww.ac.id Internet Source	43%
3	journal.uad.ac.id Internet Source	3%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
6	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		